

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1) mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan *illegal logging* dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Formulasi Tindak Pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang
  - Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law*) reformasi. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materialnya.
  - Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengetahui pada saat ini.
  - Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.
  - Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.
  - Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”
  - Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dari adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Kata kunci : Tindak Pidana *Illegal Logging*, sanksi pidana.

## ABSTRACT

The research entitled "The Prudent of criminal law in overcoming The criminal Acts of Illegal Logging in Indonesia" by normative judicial formality approaching that provided with by case study, it is meant to 1) know and analysis is formulation policy law acts illegal logging and its sanction implement that prevailing present 2) giving thinking contribution to warm up lawmaking in formulate law in particular in about problem illegal logging and sanction implement Law acts at proximately. Of research result revealed that:

1. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations.
  - The torestarion criminal acts of illegal logging and formulated in chapter 50 and 78 the penal code No. 41 of 1999. Its definition however, by all means of it is not limitative formulated. The result was that there were many lawyers interpreted by their own meanings.
  - The subjects of the forestation criminal acts dealing with the penal code no 41 of 1999 are that, they, who involve personally, corporations arxUor organizations, are stated in single chapter. It does not treat in different ways in personal or corporations matter. It meant that corporations should take the similar condemned as what personal should be.
  - Of punishments are cumulatively. The primer sentenced is sentenced to imprisonment and fined; another sentenced was a kind of confiscated goods and/or its devices used crimes, some compensation and some calisthenics punishment to the corporations.
  - The fine has no completed particular regulations yet for the sentenced corporations. The application of the prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementing seemed that it does not run well with the justice and established aspects. It obtained in several illegal logging cases which occurred in the authority of the District Court Of Blora. Purwodadi and Bojonegoro.
2. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its curnew implaneatarioas for the Eosin
  - The definition of the criminal acts in the forest frame
  - The subjed of the ariisminai ass m the forest frame (personally, corporatioas and public servant) was formulated in the chapters comprehensively.
  - Instead of stiffness the sentenced should abstain some alternatives or cumulative-alternatives way.

Key words : Criminal Acts of Illegal Logging, the punishments